ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang membahas tentang Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Di Minimarket Surabaya. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana mekanisme penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di minimarket Surabaya? dan bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap kebijakan kantong plastik berbayar di minimarket Surabaya?.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan terakhir dengan telaah pustaka. Kemudian data diolah dengan cara editing, organizing yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqih dan dalil-dalil yang berkaitan dengan pembahasan dengan cara teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di minimarket Surabaya sudah sesuai himbauan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di Surabaya, kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak tanggal 21 Februari 2016. Harga kantong plastik yang disepakati yaitu Rp. 200/lembar. Adapun penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di minimarket Surabaya telah memenuhi syarat serta landasan hukum *maṣlaḥah mursalah.* Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan suatu maslahah yang ditujukan untuk kepentingan umum. Hal ini dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh pemerintah, yang menunjukan penurunan jumlah penggunaan kantong plastik sekali pakai rata-rata 25% selama periode Januari – Maret 2016. Tujuan dari kebijakan tersebut secara jelas adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan sehingga lingkungan yang lestari juga bisa dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat. Dalam kebijakan tersebut terdapat suatu tujuan untuk melindungi jiwa dan hal ini tidak ada pertentangan dengan tujuan yang ditetapkan oleh syara' (*Maqāṣid al-Sharī'ah*) karena pencemaran sampah plastik yang tertimbun dan sulit terurai dapat menyebabkan kerusakan bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Kebijakan ini memang dipandang dapat memberatkan masyarakat kalangan menengah ke bawah, namun jika diteliti lagi hal ini lebih bisa mendidik dan merubah pola pikir masyarakat untuk tidak bergantung pada kantong belanja plastik yang dapat mencemari lingkungan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka saran dari peneliti yaitu: *Pertama,* perlu adanya Peraturan Menteri yang mengatur kebijakan tersebut sebagai dasar hukum yang pasti yang dapat memberi sanksi bagi pihak-pihak yang mengambil keuntungan sepihak. *Kedua,* pemerintah bersama pihak retail dan komunitas lingkungan harus berupaya menciptakan kantong belanja ramah lingkungan yang tidak berbahan plastik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id